



PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional yang dilakukan secara baik, profesional, terarah, dan berkesinambungan;
 - b. bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025, perlu disesuaikan dengan asumsi kerangka ekonomi daerah, asumsi keuangan daerah, serta kondisi terkini perangkat daerah;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Bantul Nomor 41 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, perlu diubah untuk mengakomodir kebutuhan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan dan penganggaran yang berisi perubahan rencana pendapatan, perubahan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta perubahan rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bantul.
6. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2025.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025.

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : PENUTUP

Pasal 4

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
 - a. Perubahan Renja Sekretariat Daerah;
 - b. Perubahan Renja Sekretariat DPRD;
 - c. Perubahan Renja Inspektorat Daerah;
 - d. Perubahan Renja Dinas Daerah yang terdiri atas:
 1. Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;

2. Perubahan Renja Dinas Kesehatan;
 3. Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 4. Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 5. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 6. Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
 7. Perubahan Renja Dinas Sosial;
 8. Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
 9. Perubahan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
 10. Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 11. Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 12. Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup;
 13. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 14. Perubahan Renja Dinas Perhubungan;
 15. Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
 16. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 17. Perubahan Renja Dinas Pariwisata;
 18. Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja;
 19. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
 20. Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.
- e. Perubahan Renja Badan Daerah yang terdiri atas:
1. Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
 3. Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
 4. Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 5. Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- f. Perubahan Renja Kapanewon yang terdiri atas:
1. Perubahan Renja Kapanewon Srandakan;
 2. Perubahan Renja Kapanewon Sanden;
 3. Perubahan Renja Kapanewon Kretek;
 4. Perubahan Renja Kapanewon Pundong;
 5. Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro;
 6. Perubahan Renja Kapanewon Pandak;
 7. Perubahan Renja Kapanewon Pajangan;
 8. Perubahan Renja Kapanewon Bantul;
 9. Perubahan Renja Kapanewon Jetis;
 10. Perubahan Renja Kapanewon Imogiri;
 11. Perubahan Renja Kapanewon Dlingo;
 12. Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan;
 13. Perubahan Renja Kapanewon Pleret;
 14. Perubahan Renja Kapanewon Piyungan;
 15. Perubahan Renja Kapanewon Sewon;

- 16. Perubahan Renja Kapanewon Kasihan;
- 17. Perubahan Renja Kapanewon Sedayu.
- g. Perubahan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 26 Juni 2025
BUPATI BANTUL

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 26 Juni 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,


AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 32

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANTUL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I Tahun 2025 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029;

- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul;
- l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2025 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I
TAHUN 2025

Evaluasi Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I dilakukan terhadap penilaian realisasi DPA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I 2025

Nama Perangkat Daerah: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)=(6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					14.293.224.279	0	3.335.533.818		23,34	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	82	9.767.388.365	24	2.370.578.959	29,60	24,27	
1.05.01.2 01	Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Capaian Kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	28.607.500	60	4.226.000	60,00	14,77	
1.05.01.2 01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan	Dokumen			0	-			
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	Dokumen	4	10.377.500	2	2.101.000	50,00	20,25	
1.05.01.2 01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Kinerja	Dokumen			0	-			
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	Dokumen	1	18.230.000	1	2.125.000	100,00	11,66	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)=(6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.05.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	8.290.602.988	100	2.030.421.064	100,00	24,49	
1.05.01.2.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Kali			0	-			
		Pembayaran TPP	kali			0	-			
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	Orang/Bulan	50	6.493.067.980	50	1.583.333.250	100,00	24,38	Penerapan SP2D Online
1.05.01.2.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan hasil penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Dokumen			0	-			
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	Dokumen	3	1.797.535.008	3	447.087.814	100,00	24,87	Penerapan SP2D Online, Aplikasi perpajakan Coretax
1.05.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	368.078.103	100	94.380.000	100,00	25,64	
1.05.01.2.05.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian dinas beserta atribut yang disediakan	Stel			0	-			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)=(6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	Paket	1	137.500.000	1	84.180.000	100,00	61,22	Kebijakan penundaan kegiatan dalam rangka efisiensi anggaran
1.05.01.2.05.0009	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Peserta pendidikan dan pelatihan pegawai berdasar tugas dan fungsi	Orang			0	-			
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	Orang	235	230.578.103	235	10.200.000	100,00	4,42	
1.05.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen	100	182.422.635	18,75	37.919.000	18,75	20,79	
1.05.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat tulis kantor	Jenis			0	-			
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	Paket	12	60.908.135	3	23.419.000	25,00	38,45	Kebijakan penundaan kegiatan dalam rangka efisiensi anggaran
1.05.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat	Dokumen			0	-			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)=(6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Laporan SPPD dalam daerah	Dokumen			0	-			
		Laporan SPPD luar daerah	Dokumen			0	-			
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD*	Laporan	12	108.519.500	3	11.700.000	25,00	10,78	
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	4.995.000	0	-	0,00	-	Kebijakan penundaan kegiatan dalam rangka efisiensi anggaran
	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu*	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	12	8.000.000	3	2.800.000	25,00	35,00	
1.05.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	368.167.071	25	96.942.395	25,00	26,33	
1.05.01.2.08.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	Jenis			0	-			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	Laporan	12	368.167.071	3	96.942.395	25,00	26,33	Kebijakan penundaan kegiatan dalam rangka efisiensi anggaran

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)=(6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.05.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Persen	100	523.510.068	25,24	106.690.500	25,24	20,38	
1.05.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan dinas yang dipelihara	Unit			0	-			
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	Unit	52	490.310.068	13	103.840.500	25,00	21,18	
1.05.01.2.09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan mesin yang dipelihara	Jenis			0	-			
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	Unit	50	14.630.000	13	2.850.000	26,00	19,48	
1.05.01.2.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung kantor yang dipelihara	Unit			0	-			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)=(6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *	Unit	1	18.570.000	0	-	0,00	-	Kebijakan penundaan kegiatan dalam rangka efisiensi anggaran
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	6.000.000	0	-	0,00	-	
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel*	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10	-	0	-	0,00		
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	6.000.000	0	-	0,00	-	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	100	4.525.835.914	21	964.954.859	21,32	21,32	
1.05.02.2.01	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelanggaran kantrantibmas yang ditindaklanjuti	Persen	100	2.853.997.372	30,32	726.599.697	30,32	25,46	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)=(6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.05.02.2.01.0015	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Laporan intel kewilayahann	Dokumen			0	-			
		Laporan patroli kewilayahan	Dokumen			0	-			
		Laporan pengamanan kewilayahan	Dokumen			0	-			
		Laporan pengawasan pejabat	Dokumen			0	-			
		Laporan pengendalian operasi kewilayahan	Dokumen			0	-			
		Patroli kewilayahan	Dokumen			0	-			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)=(6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan*	Laporan	12	1.320.269.524	3	374.979.088	25,00	28,40	
1.05.02.2.01.0016	Sub Kegiatan Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Laporan pelaksanaan penertiban kewilayahan	Dokumen			0	-			
		Laporan pelanggaran dan pengaduan trantibum yang ditangani	Dokumen			0	-			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)=(6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan*	Kasus	300	784.131.800	45	119.067.726	15,00	15,18	
1.05.02.2.01.0004	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Laporan pemberdayaan Linmas	Dokumen			0	-			
		Satlinmas Rescue Istimewa yang terlatih dan dikukuhkan	Orang			0	-			
		Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	Orang			0	-			
		Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	Dokumen	12	492.967.798	3	187.367.883	25,00	38,01	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)=(6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.05.02.2.01.0005	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	peserta pelatihan bernuansa hak asasi manusia	Orang			0	-			
		Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	Orang	100	233.310.750	200	45.185.000	200,00	19,37	Kebijakan penundaan kegiatan dalam rangka efisiensi anggaran
1.05.02.2.01.0018	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sarpras Minimal Trantibum yang dipenuhi	Jenis			0	-			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia**)	Unit	30	4.097.500	0	-	0,00	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)=(6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.05.02.2.01.0003	Sub Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota*	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	12	4.330.000	0	-	0,00	-	Kebijakan penundaan kegiatan dalam rangka efisiensi anggaran
1.05.02.2.01.0006	Sub Kegiatan Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum*	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dokumen	12	4.930.000	0	-	0,00	-	
1.05.02.2.01.0008	Sub Kegiatan Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat*	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Dokumen	12	4.800.000	0	-	0,00	-	Kebijakan penundaan kegiatan dalam rangka efisiensi anggaran
1.05.02.2.01.0017	Sub Kegiatan Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada*	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Laporan	12	5.160.000	0	-	0,00	-	
1.05.02.2.02	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti	Persen	100	1.646.855.042	25	238.355.162	25,00	14,47	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)=(6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati/Walikota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan perda/perkada kepada masyarakat/kelompok masyarakat/pelaku usaha	Laporan	12	669.450.440	3	123.450.000	25,00	18,44	
1.05.02.2.02.0002	Sub Kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Peserta Sosialisasi Pengawasan dan kepatuhan pelaksanaan perda dan perbup	Orang			0	-			Kebijakan penundaan kegiatan dalam rangka efisiensi anggaran
		Review SOP dalam penegakan Perda dan Perkada	Dokumen			0	-			
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota*	Laporan	12	232.022.437	3	11.010.000	25,00	4,75	
1.05.02.2.02.0003	Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan sidang	Dokumen			0	-			
		Laporan yustisi dan non yustisi	Laporan			0	-			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)=(6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP*	Laporan	12	745.382.165	3	103.895.162	25,00	13,94	
	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Capaian kegiatan pembinaan PPNS	Persen	12	24.983.500	0	-	0,00	-	
	Sub Kegiatan Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada*	Laporan	12	24.983.500	0	-	0,00	-	
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Pembentukan Kelompok Jagawarga	Persen	0	-		-			
2.22.08.2 .09	Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pembentukan dan pembinaan kelompok jagawarga di Pedukuhan	Pedukuhan	0	-	0	-			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)=(6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.22.08.2.09.0017	Pembinaan Jagawarga	Pembentukan kelompok Jagawarga	Pedukuhan			0	-			
		Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang Dibina*	Orang	0	-	0	-			
					14.293.224.279		3.335.533.818			

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Penerapan SP2D Online
- b. Penerapan aplikasi perpajakan Coretax
- c. Kebijakan penundaan kegiatan dalam rangka efisiensi
- d. Kekurangan gaji dan JKK/JKM/JKN tenaga Non ASN
- e. Permasalahan pembuangan/ pengelolaan sampah illegal

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2025 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2025 berdasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I dan kebutuhan prioritas yang harus ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul

Tahun 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						Satuan Polisi Pamong Praja							13.087.130.614,00	14.786.809.279,00	14.342.334.560,00							15.927.325.409,00			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							12.593.545.614,00	14.293.224.279,00	14.342.334.560,00							14.427.325.409,00			
	1	0 5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							12.593.545.614,00	14.293.224.279,00	14.342.334.560,00							14.427.325.409,00			
1	1	0 5	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP				82 Angka	82 Angka	9.174.368.137,00	9.767.388.365,00	9.712.112.849,00							10.990.515.882,00			
	1	0 5	0 1	2. 0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 persen	100 persen	26.607.500,00	28.607.500,00	28.607.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Satpol PP Kabupaten Bantul		37.206.440,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1	0 5	0 1	2. 0 1	000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	8.377.500,00	10.377.500,00	8.337.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			10.083.988,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	0	0	2.	000		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
	5	1	0	1	7						1 Laporan	1 Laporan	18.230.000,00	18.230.000,00	17.602.750,00	Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			27.122.452,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	0	0	2.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 persen	100 persen	7.869.821.323,00	8.290.602.988,00	8.290.602.988,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Satpol PP Kabupaten Bantul			9.125.145.974,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	2.	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	5	1	0	1	2						50 Orang/b ulan	50 Orang/b ulan	6.084.286.315,00	6.493.067.980,00	6.493.067.980,00	Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			7.155.244.335,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	0	0	2.	000	Pelaksanaan Penatausahaan dan																		
	5	1	0	2	3	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifi kasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	1.785.535.008,00	1.797.535.008,00	1.776.534.774,00	Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			1.969.901.639,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	2.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administراسي Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 persen	100 persen	234.931.103,00	368.078.103,00	368.078.103,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Satpol PP Kabupaten Bantul		359.908.410,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	2.	000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	137.500.000,00	134.200.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			170.531.047,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	2.	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Sub Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				235 Orang	235 Orang	134.931.103,00	230.578.103,00	202.997.700,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			189.377.363,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	2.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	-			100 persen	100 persen	177.913.135,00	182.422.635,00	182.422.635,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Satpol PP Kabupaten Bantul		323.210.497,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	2.	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	55.908.135,00	60.908.135,00	50.736.356,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			150.411.770,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	2.	000	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	2.	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	112.010.000,00	108.519.500,00	82.078.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			167.348.727,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	2.	001	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	4.995.000,00	4.995.000,00	4.125.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			450.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	0	0	2.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 persen	100 persen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Satpol PP Kabupaten Bantul		20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	2.	000	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	14 Unit	0,00	0,00	13.500.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	2.	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	6.000.000,00	6.000.000,00	8.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	0	0	2.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Jasa Penunjang	-			100 persen	100 persen	365.580.608,00	368.167.071,00	368.167.071,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Satpol PP Kabupaten Bantul		517.565.004,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	2.	000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	365.580.608,00	368.167.071,00	391.827.601,00	Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			517.565.004,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	2.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	-			100 persen	100 persen	493.514.468,00	523.510.068,00	523.510.068,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Satpol PP Kabupaten Bantul		607.479.557,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	2.	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				52 Unit	52 Unit	460.314.468,00	490.310.068,00	490.305.188,00	Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			563.604.507,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	0	0	2.	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	50 Unit	14.630.000,00	14.630.000,00	14.630.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			18.594.070,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	0	0	2.	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi				1 Unit	1 Unit	18.570.000,00	18.570.000,00	16.170.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			25.280.980,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2	1	0	0			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan				100 Persen	100 Persen	3.419.177.477,00	4.525.835.914,00	4.630.221.711,00							3.436.809.527,00		
	1	0	0	2.		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelanggaran kantrantibmas yang ditindaklanjuti	-			100 persen	100 persen	2.227.262.372,00	2.853.997.372,00	2.853.997.372,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Masyaraka Kabupaten Bantul			2.760.306.301,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	2.	000	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentrman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				12 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	4.330.000,00	4.325.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	0	0	2.	000	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentrman dan Ketertiban Umum																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				12 Dokumen	12 Dokumen	375.808.548,00	492.967.798,00	507.056.116,00	Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			536.626.021,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	2.	000	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia																	
							Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				100 Orang	900 Orang	120.500.000,00	233.310.750,00	207.181.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			137.398.464,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	2.	000	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentrman dan Ketertiban Umum																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				12 Dokumen	1 Dokumen	4.930.000,00	4.930.000,00	4.930.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	0	0	2.	000	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat																	
	5	2	0	8	1		Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan				12 Dokumen	12 Dokumen	4.800.000,00	4.800.000,00	2.125.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	2.	001	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan																	
	5	2	0	5	1		Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				300 laporan	300 laporan	1.203.669.524,00	1.320.269.524,00	1.332.580.132,00	Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			1.562.400.034,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	2.	001	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa																	
	5	2	0	6	1																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				300 Laporan	300 Laporan	503.296.800,00	784.131.800,00	960.496.111,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			504.312.582,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	2.	001	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani				12 Laporan	12 Laporan	5.160.000,00	5.160.000,00	5.142.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	2.	001	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia				30 Unit	51 Unit	4.097.500,00	4.097.500,00	6.772.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			17.569.200,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	2.		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti	-			100 persen	100 persen	1.176.931.605,00	1.646.855.042,00	1.646.855.042,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Masyaraka t Kabupaten Bantul		676.003.226,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	2.	001	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																	
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				12 Laporan	12 Laporan	276.822.940,00	669.450.440,00	591.666.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Cukai Hasil Tembaku (CHT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			17.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	2.	001	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)						
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				12 Laporan	12 Laporan	717.382.165,00	745.382.165,00	794.589.702,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			530.951.734,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
	1	0	0	2.	001	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																					
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				12 Laporan	12 Laporan	182.726.500,00	232.022.437,00	189.215.900,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			128.051.492,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
	1	0	0	2.		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Capaian kegiatan pembinaan PPNS	-			100 persen	100 persen	14.983.500,00	24.983.500,00	24.983.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Anggota PPNS Kabupaten Bantul			500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
	1	0	0	2.	000	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS																					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				12 Laporan	12 Laporan	14.983.500,00	24.983.500,00	24.141.750,00	Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							493.585.000,00	493.585.000,00	0,00						1.500.000.000,00		
	2	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							493.585.000,00	493.585.000,00	0,00						1.500.000.000,00		
3	2	2	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Pembentukan Kelompok Jagawarga				88,31 Persen	88,31 Persen	493.585.000,00	493.585.000,00	0,00							1.500.000.000,00	
	2	2	0	5.		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pembentukan dan pembinaan kelompok jagawarga di pedukuhan	-			832 pedukuh an	832 pedukuh an	493.585.000,00	493.585.000,00	493.585.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Masyaraka t pedukuhan		1.500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	2	2	0	5.	001	Pembinaan Jagawarga																	
	2	2	8	0	2																		
				7																			

[illegible]

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Selanjutnya, Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2025.

✕ Kepala Satuan Polisi Pamong Praja ✕
Kabupaten Bantul



Raden Jati Bayubroto, SH. M.Hum
NIP. 19700525 199003 1 002